

ABSTRAK

Profesi Advokat merupakan suatu bentuk profesi yang terhormat (*officium nobile*). Dasar keberadaan Lembaga Advokat (Penasehat Hukum) di Indonesia adalah Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan, advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan Perundang-undangan. Advokat merupakan suatu profesi yang memberikan jasa bantuan hukum maupun melakukan pendampingan terhadap seseorang (klien) yang mengharapkan suatu keadilan dalam proses hukum. Pendampingan merupakan suatu proses pemberian kemudahan memecahkan masalah dalam menghadapi proses hukum dari klien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penuntutan terhadap pelaku tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan di Pengadilan Negeri Pati untuk tercapainya *due process of law*, untuk mengetahui dan menganalisis peran Advokat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap terdakwa tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan di Pengadilan Negeri Pati untuk tercapainya *due process of law* dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat peran Advokat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap terdakwa tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan di Pengadilan Negeri Pati dan bagaimana upaya mengatasinya untuk tercapainya *due process of law*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan *juridis empiris*, spesifikasi penelitiannya deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori penegakan hukum dan teori keadilan. Kemudian untuk data sekunder diperoleh dari dokumen bahan atau bahan pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran Advokat dalam pendampingan terdakwa tindak pidana mempergunakan suatu senjata tajam dan penganiayaan atas nama Danang Purwanto bin Parmuji telah terbukti melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP terhadap putusan perkara Nomor: 18/Pid.B/2020/PN Pti dengan putusan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari terhadap terdakwa. Peran Advokat sendiri sudah semaksimal mungkin untuk mendampingi terdakwa dengan adanya terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya diberikan hak untuk mengajukan pembelaan atas Tuntutan Pidana yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum demi terciptanya pemahaman hukum yang sama dan sesuai peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya proses hukum yang adil.

Kata Kunci : Peran Advokat, Terdakwa, Tindak Pidana, Senjata Tajam dan Penganiayaan.

ABSTRAC

Advocate profession is a form of respectable profession (officium nobile). The basis for the existence of an Advocate Institute (Legal Advisor) in Indonesia is Law number 18 of 2003 concerning Advocates. In Article 5 paragraph (1) it is stated that an advocate has the status of a law enforcer, free and independent which is guaranteed by laws and regulations. Advocate is a profession that provides legal aid services and provides assistance to a person (client) who hopes for justice in the legal process. Assistance is a process of providing ease of solving problems in facing legal processes from clients.

The purpose of this research is to find out and analyze the prosecution procedure against the perpetrator of a criminal act using a sharp weapon and assault at the Pati District Court to achieve the due process of law, to find out and analyze the role of advocates in the implementation of assistance to the accused of using a sharp weapon and persecution. at the Pati District Court to achieve due process of law and to find out and analyze the factors inhibiting the role of Advocates in the implementation of assistance to the accused of using a sharp weapon and torture at the Pati District Court and how to overcome them to achieve due process of law.

This research uses an empirical juridical approach, the research specification is descriptive. The data used in this research are primary data obtained from field studies which are analyzed qualitatively using law enforcement and justice theories. Then for secondary data obtained from material documents or library materials.

The results of the study concluded that the role of the Advocate in assisting the accused of using a sharp weapon and maltreatment on behalf of Danang Purwanto bin Parmuji has been proven to have violated criminal acts as regulated and subject to criminal penalties in Article 2 Paragraph (1) of the Emergency Law No. 12 of 1951 and Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code against the verdict of case Number: 18 / Pid.B / 2020 / PN Pti with the decision of the Panel of Judges to imprison the defendant for 4 (four) months and 15 (fifteen) days. The role of the advocate itself has been as maximally as possible to support the defendant in the presence of the defendant and / or his legal adviser to be given the right to file a defense of the criminal charges that have been filed by the public prosecutor for the sake of creating a common understanding of the law and in accordance with the laws and regulations to achieve a fair legal process

Keywords : The Role of Advocates, Defendants, Crime, Sharp Weapons and Persecutio..